

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikuntoro, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rianeka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2021). *Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia*. Surabaya: UPNVJ Jawa Timur.
- Imron, A. (2019). *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM Press.
- Lamintang, P. L. (2009). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, E. P. (1995). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: FH UII.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningtias, A. D. (2018). *Prinsip Pembuktian Minimum (Bewijs Minimum) Dalam Tindak Pidana Cyber Menurut KUHAP dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Semnas SIPENDIKUM .

- Paslydja, A. (1997). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Prints, D. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.
- Putra, P. D. (2011). *Pembuktian Terhadap Data Elektronik Dalam Perkara Pidana Cyber Crime*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Dwi Baskoro dan Nyoman Sarikat. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Simorangkir, J. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sutanti, R. D. (2013). *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip.
- Sutarto, S. (2005). *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Taufani, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wardhani, D. (2017). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UII.

B. Artikel Jurnal/Makalah

- Arief, Barda Nawawi. (2005). Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. *Jurnal Law Reform Vol I No 1*
- Asshiddiqie, J. (2021). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Artikel Pengadilan
- Hariyanto. (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Universitas Gajah Mada.
- I Made Sukandana, dkk. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian. *Law Reform Undip Vol 14 No 2*
- Luqman, L. (1995). Saksi Mahkota. *Forum Keadilan Nomor 11*.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *FH Unigal Vol 6*, 132.
- Susanti, A. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Jurnal Lex Crime Vol II No 2*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2437 K/Pid.Sus/2011

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana Tahun 2010

D. Halaman Web

CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021), diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>